

PENDIDIKAN DAN MITRA KESEJAJARAN PRIA-WANITA

Oleh: Farida Hanum¹

Pendahuluan

Pandangan masyarakat terhadap kedudukan dan hak antara pria-wanita tidaklah sama. Ada yang beranggapan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria, namun ada juga yang berpandangan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin sebab itu tidak lazim dilihat dari sudut budaya yang telah lama tertanam pada sebagian anggota masyarakat. Anggapan terakhir lebih didasarkan pada pandangan bahwa secara kodrat budaya, kedudukan wanita di bawah pria dan mempunyai hak-hak yang tidak sama dengan pria. Wanita dipandang sebagai golongan subordinat.

Pada dasarnya kodrat wanita secara biologis sebagai jenis yang berbeda dengan pria hanya ada empat yaitu, (1) menstruasi, (2) mengandung, (3) melahirkan, (4) menyusui. Namun, secara budaya ternyata konsep perbedaan wanita dan pria lebih luas lagi. Di mana perbedaan antara pria dan wanita ditunjukkan dengan adanya diferensiasi peran, yaitu peranan kewanitaan (*femine-roles*) dan peranan kepriaan (*Masculine-roles*), yang bahkan memisahkan *space* wanita dan pria ke dalam *domestic domain* bagi wanita serta *public-domain* untuk pria.

Jika dilihat secara fisik biologis antara wanita dengan pria memang berbeda. Fungsi reproduksi yang hanya diemban oleh wanita memang sudah merupakan kodrat alam yang tak terelakkan. Namun, hal ini bukanlah berarti bahwa sudah sewajarnya jika peranan dan domain mereka dalam masyarakat dipisahkan sehubungan dengan adanya perbedaan biologis tersebut.

Farida Hanum adalah staf pengajar pada Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA

Untuk memahami kedudukan dan peran antara wanita dengan pria perlu dipahami konsep-konsep pemikiran yang melatarbelakangi-nya. Dalam hal ini tingkat pendidikan dan wawasan seseorang pria ataupun wanita sangat berperan. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang seyogianya semakin rasional dan berwawasan luas. Adanya pendidikan yang memadai, seseorang dapat mencerna dan memahami informasi yang diterimanya. Seorang yang berpendidikan relatif tinggi akan mudah mendapat informasi dari luar bidang yang ditekuninya, dan gemar mencari informasi lain untuk menambah wawasan. Dengan mempunyai wawasan yang luas seseorang lebih mudah diajak untuk memahami keadaan dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Termasuk kesadarannya memahami perkembangan peran pria dan wanita dalam masyarakat dan keluarga. Selanjutnya ikut berperan dalam mewujudkan suatu tataran masyarakat yang demokratis yang ditandai dengan adanya kemitrasejajaran pria-wanita.

Memahami Konsep Peran Pria dan Wanita

Diferensiasi peran antara pria dan wanita sering dijadikan pangkal permasalahan dalam studi wanita. Pola peran dalam masyarakat tradisional yang terwujud dalam hubungannya di rumah tangga, pada umumnya didasarkan atas jenis kelamin. Yaitu pria bertugas sebagai pencari nafkah dan berorientasi ke luar rumah (publik) sedangkan wanita mengasuh anak, menyiapkan segala keperluan keluarga dan berorientasi ke dalam rumah (domestik). Dalam hal ini peran masyarakat tak dapat diabaikan dalam mengukuhkan pembagian peran ini. Sosialisasi sejak dini mempengaruhi dan memperluas adanya perbedaan peran sosial tersebut (Parson, 1980).

Pola pembagian peran tersebut mencerminkan sistem kekerabatan yang berlaku. Sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat akan mewarnai pola pembagian peran tersebut. Di Indonesia pada dasarnya dikenal adanya tiga sistem kekerabatan, yaitu: *pertama*, adalah sistem matrilineal, maksudnya keturunannya dihitung melalui garis ibu seperti yang dijumpai di sebagian masyarakat Minangkabau. Kedudukan wanita/ibu dalam keluarga sangat kuat, bersifat sentral dan ber-

tanggung jawab terhadap keluarga besar. *Kedua*, adalah sistem Patrilineal, yang keturunan dihitung dari garis ayah seperti yang terdapat pada masyarakat Batak, Ambon, dan sebagainya. Keputusan selalu berada di tangan ayah (pria). *Ketiga*, adalah Bilineal yaitu menurut keturunan ayah dan ibu. Garis keturunan pria dan wanita berada pada posisi yang sama, seperti yang terdapat pada suku Jawa (Koentjoroningrat, 1989).

Sistem nilai masyarakat tersosialisasi dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, melakukan sistem masyarakat melalui tiga cara: *pertama*, sebagai unit ekonomi, tempat reproduksi; pembentukan angkatan kerja baru dan juga sebagai arena konsumsi. *Kedua*, merupakan tempat pembentukan kesatuan keluarga secara ideologis, sistem nilai kepercayaan, agama, tradisi, sosial, kebudayaan dan juga konservatisme dipupuk sejak kecil. *Ketiga*, sebagai tempat terbentuknya suatu kesatuan "biososial" yaitu dimana hubungan alami antara ibu-ayah-anak dikonstruksi secara sosial.

Dalam memahami peran pria-wanita sering digunakan teori Nature dan teori Nurture.

Teori Nature

Teori nature lebih menekankan bahwa adanya pembagian kerja antara pria dengan wanita dalam masyarakat atau keluarga karena adanya perbedaan secara biologis. Para tokohnya menganggap bahwa wanita tak lebih dari pengembang keturunan, oleh sebab itu wajar bila mereka berkewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak (Scoppenhouwer dalam Budiman, 1980).

Keyakinan para Konservatif mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan psikologis dan sosial antara jenis kelamin ditentukan oleh perbedaan biologis, digunakan untuk menyatakan bahwa status wanita dalam masyarakat adalah alami serta tak dapat diubah (Jagsar & Struhl dalam Andersen, 1983). Tempat mereka adalah di sektor domestik. Dalam kehidupan sehari-hari pendapat ini masih terlihat realitasnya pada kehidupan sebagian masyarakat. Tidak jarang wanita karier yang kariernya cemerlang tetapi mereka tidak menikah dan tidak berketurunan dipandang gagal dan dianggap melawan kodratnya. Teori nature

berasumsi bahwa antara pria dan wanita secara psikologis juga berbeda. Pria lebih rasional, lebih agresif dan lebih aktif, sedangkan wanita lebih emosional, pasif dan submisif. Perbedaan yang demikian disebabkan oleh faktor-faktor biologis yang berbeda. Oleh sebab itu bila kehidupan wanita hanya berkisar di lingkungan rumah tangga (*domestik domain*), dianggap sesuatu yang alami. Dengan melakukan peranan yang dianggap alami pula, yaitu melahirkan, merawat dan membesarkan anak, mengurus keperluan keluarga dan memelihara hubungan yang baik dengan suami, agar tercipta suatu rumah tangga yang harmonis. Semua itu adalah *feminineroles* yang sudah sewajarnya dilakukan wanita. Sedang aktivitas pria dikatakan berada di lingkungan publik (*public-domain*), yaitu di luar rumah tangga dengan tugas utama mencari nafkah. Karena peran utamanya dalam ekonomi rumah tangga, maka sewajarnya pria (suami) yang memimpin dan lebih berkuasa menentukan hal yang berhubungan dengan keluarga serta anggotanya.

Teori Nurture

Teori nature ditentang oleh penganut teori nurture (kebudayaan) yang mengatakan bahwa perbedaan psikologis antara pria dan wanita tercipta melalui proses belajar dari lingkungan. John Stuart M. Mengungkapkan bahwa apa yang disebut sebagai sifat kewanitaan adalah hasil pemupukan masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Bahwa usaha membedakan kedua golongan pria dan wanita, dan usaha untuk membedakan kedua golongan manusia ini dalam peranan sosial mereka, merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan. Golongan yang kuat, yakni kaum laki-laki, selalu melihat keunggulan sebagai sesuatu yang alamiah (Budiman, 1985).

Teori Nurture menganggap bahwa adanya perbedaan peran dan pembagian kerja dalam rumah tangga dikarenakan proses sosialisasi dari masyarakat lingkungan, yang membedakan fungsi dan tugas antara wanita dan pria itu tidak sama. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa adanya perubahan faktor-faktor yang tetap mempertahankan pembagian kerja secara seksual. Keluarga mempunyai dua fungsi yang harus dikembangkan secara khusus yakni mendidik anak-anak dan yang lain

adalah memproduksi makanan. Oleh karena itu wanita dan pria dalam keluarga sudah dididik ke arah fungsi yang akan mereka mainkan ketika membentuk keluarga. Dengan demikian pandangan inipun menganggap bahwa adanya pembagian kerja seksual dalam keluarga adalah wajar. Seperti pendapat Gue Hel (dalam Budiman, 1985) yang mengatakan bahwa pembagian kerja secara seksual merupakan sesuatu yang tidak bersifat eksploitatif, dalam pengertian bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan karena adanya pembagian kerja seperti itu.

Kedua pandangan (teori) di atas ternyata di masyarakat masing-masing ada penganutnya. Namun tak sedikit pula yang menolak dan menentang konsep tersebut, baik dari pihak wanita maupun pria. Pada dasarnya pria dan wanita mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan diri. Keputusan pribadi sebagai seorang manusia untuk berkembang sesuai jati diri dan menjadi subjek atas diri sendiri adalah hak seorang individu pria ataupun wanita.

Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Kemitrasejajaran Pria-Wanita

Sebenarnya adanya perbedaan peran antara laki-laki dan wanita tidaklah menjadi masalah, walau penyebab terjadinya perbedaan tersebut masih tetap dipertentangkan oleh masing-masing wakil dari aliran-aliran yang berbeda. Hanya saja yang penting dalam permasalahan ini adalah bagaimana posisi masing-masing dalam hubungan kerjanya dan bagaimana memberi nilai terhadap prestasi kerja dari masing-masing jenis kelamin atau pasangannya. Noerhadi (1990) menyatakan bahwa diferensiasi peran yang didasarkan perbedaan jenis kelamin tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang keliru, akan tetapi penilaian yang berat sebelah yang dipertanyakan keabsahannya. Karena pada dasarnya peran wanita dan pria tersebut adalah saling mengisi dan melengkapi. Akan tetapi sering penilaian terasa kurang adil untuk pekerjaan domestik wanita, yang dianggap tidak menghasilkan uang, sehingga secara ekonomi wanita bergantung pada pria.

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan pesatnya kemajuan wanita di bidang pendidikan, terjadi perubahan pandangan terhadap keberadaan wanita. Dalam konsepsi yang baru wanita lebih memiliki keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya, sehingga lebih bisa mengembangkan kepribadiannya dan minat pribadi. Perubahan yang memungkinkan wanita lebih aktif dengan kegiatan yang menjadi pilihannya.

Demikian pula di pihak pria, mereka lebih dapat berbagi kekuasaan pada wanita yang telah menyadari eksistensinya. Kepribadian yang teguh, kecerdasan dan motivasi berprestasi pada wanita yang dapat ditunjukkannya pada kaum pria, dapat mensejajarkannya dengan mereka. Kondisi ini dapat diperoleh wanita melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Keaktifan wanita dalam berbagai kegiatan masyarakat (organisasi) dan tingkat pendidikan yang relatif tinggi pada wanita, ternyata berkontribusi positif bagi kesejajaran hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Pendidikan yang relatif tinggi ternyata mendorong wanita untuk mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Sebagian besar wanita bekerja ternyata tidak semata-mata ingin menambah *income* keluarga. Walaupun suami telah berpenghasilan tinggi, ternyata wanita berpendidikan relatif tinggi ingin tetap bekerja dan berkariir sesuai dengan keinginannya (Farida, 1995).

Selanjutnya tingkat pendidikan yang relatif tinggi memberi kecenderungan adanya "keseimbangan" baik dari sudut wewenang maupun saling pengaruh mempengaruhi. Dalam studi Kephart (1977) Tingkat pendidikan seseorang membantu individu untuk lebih dapat menggerakkan, mengendalikan, mempengaruhi pasangannya. Hal ini pun didukung oleh penemuan Ricle (1978) dan Pudjiwati Sayogya (1983) bahwa tingkat pendidikan dapat menyeimbangkan wewenang pria dan wanita, sehingga mereka dapat menjadi mitra sejajar baik dalam keluarga maupun di masyarakat.

Penutup

Dalam rangka mewujudkan Kemitra Sejajaran antara pria dan wanita, pendidikan sangatlah berperan. Pendidikan yang dimiliki wanita akan mendorongnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai dengan aspirasi dan potensi-potensinya. Hal ini berarti peran wanita dapat lebih luas dan lebih mandiri, sehingga penilaian pria terhadap wanita-pun akan bergeser dari sub-ordinat menjadi mitra sejajar. Selanjutnya pada pria yang berpendidikan, mereka lebih rasional untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal menanggapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan peran pria dan wanita, ternyata pria berpendidikan lebih mampu dibanding lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan pada masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi, Kemitrasejajaran antara pria dan wanita lebih mudah terwujud.

Daftar Pustaka

- Andersen, Margaret L. (1983). *Thinking About Women: Socio Logical and Feminist Perpectives*. New York: Macmillan Publishing.
- Arief Budiman. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Gramedia.
- Farida Hanum. (1995). *Wanita, Kekuasaan dan Keputusan Keluarga. Thesis*. Yogyakarta: UGM.
- Noerhadi, Toety Herawati & Aida Vitayalas. Hubies, Ed. (1990). *Dinamika Wanita Indonesia Seri 01: Multidimensial*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Mei 1990.
- Pudjiwati Sajogyo. (1983). *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali.

Philip F. Rice. (1979). *Marriage and Parenthood*. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Talcott Parsons and Robert F. Bales. Family: *Socialization and Interaction Process*. London Routledge & Kegan Paul.

William M. Kephart. (1977). *The Family, Society and Individual*. Atlanta: Houghton Mifflin.